

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda (Sunarto, 2009). Teori agensi juga membahas tentang hubungan antara dua pihak tersebut yaitu pihak yang mendelegasikan tugas kepada seseorang yang melakukan tugas tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Orang yang melakukan pekerjaan disebut sebagai agen dan seseorang yang mendelegasikan tugas disebut pemilik (*principal*), pemilik di perusahaan publik adalah pemegang saham dan agen merupakan manajemen perusahaan. Selanjutnya, manajemen dan pemilik melakukan kesepakatan kerja untuk mencapai manfaat yang diharapkan (Sunarto, 2009). Kesepakatan kerja tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik dan dapat menjamin manajemen untuk menerima *reward* (Lambert, 2001). Penilaian atas kesepakatan tersebut dapat diperoleh melalui kinerja perusahaan (Sunarto, 2009).

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara prinsipal dengan agen. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda, pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer.

Dengan demikian muncullah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan kompensasinya. Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua kepentingan tersebut (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2004). Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasarkan maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi pengelola dengan fungsi kepemilikan, manajemen tidak menanggung resiko atas kesalahan dalam mengambil keputusan, resiko tersebut sepenuhnya ditanggung pemegang saham (Prinsipal). Oleh karena itu manajemen cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status.

Kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik dalam bentuk laporan keuangan (Sunarto, 2009). Di dalam perusahaan, seringkali diasumsikan bahwa agen mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Hal ini yang disebut dengan *asymmetry information* (Thanh dan Cheung, 2010). Ketika pemilik tidak dapat memonitor secara sempurna aktivitas manajemen, maka secara potensial manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level kompensasinya. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan manajemen adalah manajemen laba. Jika kebijakan manajemen

laba tersebut membawa keinformasian laba, maka kualitas laba akan meningkat. Jika kebijakan manajemen laba tidak membawa keinformasian laba, maka kualitas laba akan menurun dan laba menjadi kabur (Sunarto, 2009)

Asymmetry information yang terjadi dapat diatasi dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen, dengan harapan bahwa manajemen akan mempunyai keinginan yang selaras dengan pemegang saham. Untuk melindungi kepentingannya, pemilik akan membuat suatu fungsi yang dapat mengawasi agen (Adams, 1994) dalam Thanh dan Cheung (2010). Internal auditor dan komite audit menjadi fungsi yang menjembatani agen dan pemilik (Thanh dan Cheung, 2010), karena objek yang dinilai oleh audit internal adalah pengendalian internal dan audit internal bekerja sama dengan komite audit. Pengendalian internal dapat menjadi sarana pengawasan untuk memastikan kesamaan antara kepentingan agen dan kepentingan pemilik, dan pemberian informasi atas pengendalian internal dapat menjadi alat yang mengurangi adanya *asymmetry information* antara agen dan pemilik. Melalui pemberian informasi, pemilik dapat mengetahui bahwa agen telah melakukan kinerja yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pengungkapan ini juga berguna bagi pihak agen untuk memelihara dan menjaga agar pemegang saham tetap berinvestasi pada perusahaannya (Thanh dan Cheung, 2010).

2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya (Arens, 2008). Disamping itu, COSO dalam Moeller (2009) menekankan beberapa definisi tentang pengendalian internal, yaitu sebuah proses yang terintegrasi dengan infrastruktur perusahaan.

Moeller (2009) juga memberikan definisi pengendalian internal yang sedikit berbeda, yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh manajemen, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang reliabilitas informasi keuangan dan operasional, kepatuhan terhadap peraturan, keamanan aset, efisiensi operasional, pencapaian tujuan, dan nilai integritas dan etika. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa pengendalian internal tidak hanya menyangkut masalah keuangan dan akuntansi, tetapi juga menyangkut seluruh kegiatan operasional perusahaan.

Sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pengendalian Internal Akuntansi (*Preventive Controls*)

Pengendalian Internal Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2. Pengendalian Internal Administratif (*Feedback Controls*).

Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi) Contoh: pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Pengguna laporan keuangan memiliki gambaran penilaian dari hubungan pengendalian internal yang berpengaruh pada manajemen (Siti, Aminul, dan Suraiya, 2011). Kemampuan operasional perusahaan yang baik dapat dinilai dari tingginya tingkat pengungkapan informasi pengendalian internal yang ada (Lang dan Ludholm's, 1993) sehingga dapat mengurangi kekhawatiran pemegang saham dalam informasi laporan tahunan yang dibuat oleh manajemen (Arifuzzaman, 2011).

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal telah menjadi dasar dalam proses bisnis operasional dan proses bisnis akuntansi yang efektif (Moeller, 2009). Hal ini menunjukkan dengan adanya suatu sistem pengendalian internal dalam sebuah perusahaan, aktivitas bisnis dan operasional perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh COSO, Arens (2008) memaparkan tiga tujuan umum bagi manajemen dalam merancang suatu pengendalian internal.

1) Keandalan laporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan misalnya GAAP. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan ialah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan ini.

2) Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Perusahaan publik, perusahaan non publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Pengendalian internal merupakan suatu cara pengendalian diri yang dilakukan perusahaan untuk tetap mematuhi berbagai hukum dan peraturan tersebut.

Pengendalian internal dirancang dan dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Setiap perusahaan dapat mempunyai tujuan yang berbeda namun pada dasarnya tujuan-tujuan tersebut mengarah pada ketiga tujuan di atas. Untuk mencapai tujuan, perusahaan dapat mengalami kejadian-kejadian tidak terduga yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Sehingga dibutuhkan suatu pengendalian untuk dapat menghadapi atau mengelola kejadian tersebut agar perusahaan tetap dapat mencapai tujuannya.

2.1.2.3 Fungsi Pengendalian Internal

Berdasarkan *Plan Advisory* yang dikeluarkan oleh AICPA tahun 2007, pengendalian internal dapat melindungi suatu perencanaan dengan dua cara yaitu:

- 1) *By minimizing opportunities for unintentional errors or intentional fraud that may harm the plan. (Preventive Controls)*
- 2) *By discovering small errors before they become big problems. (Detective Controls)*

Pengendalian internal dapat bertindak sebagai upaya pencegahan, yaitu dengan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan yang dapat merusak suatu rencana (tujuan). Pengendalian internal juga dapat bertindak sebagai upaya penemuan, yaitu dengan menemukan kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang diharapkan tidak semakin membesar dan semakin merugikan perusahaan. Turner dan Owroso (2009) menambahkan satu fungsi lagi bagi pengendalian internal, yaitu sebagai *Corrective Control* atau fungsi koreksi. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan pada *preventive* dan *detective control*, pengendalian internal dapat menyediakan tindakan korektif sebagai suatu solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

2.1.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit, di dalam Boynton (2006), menyatakan bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki pengendalian internal, yang menyebabkan sebaik apapun pengendalian

internal dilakukan, hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai akan pencapaian tujuan pengendalian perusahaan.

- 1) *Mistakes in judgement*
- 2) *Breakdowns*
- 3) *Collusion*
- 4) *Managemenmt override*
- 5) *Cost versus benefits*

Manajemen dapat saja melakukan penilaian yang tidak tepat dalam suatu pengambilan keputusan bisnis ataupun kegiatan rutin perusahaan, dikarenakan adanya informasi yang tidak tepat, atau keterbatasan waktu. Selain itu, manajemen atau karyawan juga dapat salah paham dalam menafsirkan suatu tugas atau perintah karena ketidak hati-hatian sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan yang tidak seharusnya. Keterbatasan pengendalian internal juga dapat terjadi karena kemungkinan adanya kolusi, yaitu kerjasama diantara beberapa orang untuk melakukan kecurangan. Keterbatasan Pengendalian Internal dapat juga diketahui dari:

1. Kekeliruan pengoperasian sistem (*mistakes in judgement*) karena terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan, meskipun pengendalian internal sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah.
2. Pelanggaran sistem (*breakdowns*), baik disengaja atau tidak, misalnya karena kesalahan interpretasi, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia, atau perubahan sistem dan prosedur.

3. Kolusi, atau kerjasama negatif sekelompok orang.
4. Pelanggaran dengan sengaja oleh manajemen (*management override*)
5. Dilema biaya-manfaat (*costs versus benefits*)

2.1.2.5 Komponen Pengendalian Internal

Arens (2008) menyatakan bahwa Kerangka Terintegrasi – Pengendalian Internal COSO menjelaskan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendaliannya dapat terpenuhi. Masing-masing komponen tersebut mengandung prosedur dan aturan pengendalian yang digunakan untuk mencapai masing-masing tiga tujuan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasional. Hal ini diungkapkan Boynton (2006), “*each of the five components includes numerous control policies and procedures that are needed to achieve entity objectives in each of the three categories of objectives previously identified – financial reporting, compliance, and operations*”.

Kelima komponen pengendalian internal tersebut adalah:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Aktivitas Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pengawasan

2.1.2.6 Hal-Hal yang Berkaitan dengan Pengendalian Internal

Pengendalian Internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi antara lain:

1) Manajemen

(Arens, 2011) menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga pengendalian internal entitasnya, bahkan manajemen pada semua perusahaan publik di Indonesia, diharuskan untuk mematuhi peraturan No. X.K.6 tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini berisi tentang kewajiban bagi perusahaan publik untuk membuat laporan tahunan yang di dalamnya memuat tentang pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan.

Manajemen perusahaan harus menyusun pengendalian internal, hingga mampu memberikan keyakinan yang memadai, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, kegiatan operasionalnya telah berjalan secara efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan telah tercapai (Arens, 2011). Aktivitas pengendalian ini dilakukan pada seluruh level dalam perusahaan (Moeller, 2009). Artinya, seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan harus melakukan pengendalian pada masing-masing tanggungjawabnya untuk memastikan bahwa tugas yang dilakukannya telah efektif dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Selanjutnya, manajemen juga perlu mengawasi pelaksanaan pengendalian internal tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengendalian yang dijalankan sesuai dengan rencana dan apakah orang yang menjalankan pengendalian memiliki otoritas dan

kualifikasi yang diperlukan untuk lakukan pengendalian dengan efektif (Arens, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan itu sendiri. Seluruh pihak yang berada di dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengendalian atas tugasnya masing-masing, agar tujuan dari pengendalian internal dapat tercapai. Apabila seluruh pihak di dalam perusahaan dapat mengelola semua elemen pengendalian internal dengan baik, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan, maka pengendalian internal di perusahaan tersebut akan baik dan dapat mencapai tujuannya.

2) Unit Audit Internal

Moeller (2009) menyatakan bahwa audit internal adalah suatu fungsi (unit) formal yang ada pada perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh aktivitas dalam perusahaan sebagai suatu jasa untuk membantu manajemen, komite audit, dan pihak lain dalam perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan unit audit internal adalah seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan (Moeller, 2009). Auditor internal mempunyai peran yang signifikan dalam memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggungjawabnya. Manajemen melaksanakan pengendalian internal, kemudian auditor internal secara independen menilai pengendalian internal yang dilakukan manajemen (Reding, *et al*, 2009).

Sistem pengendalian internal telah menjadi dasar untuk proses bisnis yang efektif, dan aktivitas utama dari audit internal adalah mengevaluasi dan menilai

pengendalian yang dilakukan tersebut (Moeller, 2009). Sehingga, unit audit internal dapat dikatakan sebagai “pengawas” dalam pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan manajemen perusahaan. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal paling kurang meliputi menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan (Bapepam, 2008). Moeller (2009) menyatakan salah satu fungsi unit audit internal, “... *providing advice and counsel on new system, initiatives, and seVICES under development from an internal control perspective*”. Salah satu fungsi lain dari audit internal adalah memberikan masukan dan konsultasi dari persepektif pengendalian internal atas suatu sistem baru yang sedang dikembangkan oleh manajemen perusahaan. Audit internal juga senantiasa memberikan masukan dan saran pada pihak manajemen dalam pelaksanaan pengendalian internal perusahaan.

Keberadaan unit audit internal ditegaskan oleh Bapepam dalam peraturan No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik untuk membentuk suatu unit audit internal beserta piagam audit internal. Peraturan oleh Bapepam ini didukung oleh Moeller (2009), yang menyatakan bahwa saat suatu entitas tidak mempunyai unit audit internal, manajemen harus mengambil langkah untuk membuat unit tersebut. Peraturan Bapepam No. IX.I.7 tahun 2012 menyatakan bahwa Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal. Penggunaan nama atau istilah untuk Unit

Audit Internal tersebut dapat ditetapkan oleh masing-masing Emiten atau Perusahaan Publik.

Seseorang yang bertanggungjawab dalam unit audit internal adalah kepala unit audit internal atau *Chief Audit Executive (CAE)*, yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan komisaris (Bapepam, 2008). Keberadaan kepala unit audit internal yang jelas akan memberikan sinyal kepada *stakeholder* bahwa perusahaan benar-benar mengadakan fungsi audit internal yang efektif. Salah satu syarat utama untuk menjadi kepala audit internal adalah benar-benar memahami kebutuhan perusahaan risiko pengendalian yang potensial dan menentukan kontribusi apa yang dapat diberikan oleh unit audit internal untuk mengendalikan risiko tersebut. Selain itu, agar dapat bekerja secara efektif, kepala audit internal juga harus didukung oleh komite audit dan manajemen perusahaan (Moeller, 2009).

3) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk memiliki komite audit, seperti yang terdapat pada Peraturan No. IX.I.5 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik untuk membentuk suatu Komite Audit. Jika audit internal dibentuk dan bertanggungjawab pada dewan direksi yang tidak lain adalah manajemen perusahaan, komite audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris yang bertindak sebagai wakil dari pemegang saham

perusahaan. Artinya, komite audit menjadi wakil dari pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan. Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accrual* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan.

Salah satu tugas komite audit yang terdapat dalam peraturan Bapepam No. IX.I.5 adalah melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal, serta melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. "*Internal audit reports to the audit committee, which approves its overall planning activities and reviews the results of internal audits*" (Moeller, 2009). Komite audit membahas pertanggungjawaban pengendalian internal bersama dewan direksi untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik (Thanh dan Cheung, 2010). Komite audit bertugas *mereview* hasil audit internal yang dilakukan oleh unit audit internal, dimana objek yang diaudit oleh unit audit internal tersebut adalah pengendalian internal

yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit juga berhubungan dengan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan.

4) Manajemen Risiko

Setiap perusahaan ada untuk memberikan nilai pada para pemangku kepentingannya (*stakeholders*), namun nilai tersebut dapat terganggu oleh kejadian yang tidak terduga yang dapat terjadi pada seluruh bagian di perusahaan, dan di berbagai aktivitas perusahaan. Manajemen risiko merupakan konsep yang berhubungan dengan jaminan, dimana perusahaan dapat menggunakan jaminan tersebut untuk memberikan perlindungan dari risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan akan senantiasa menghadapi risiko yang beragam dan membutuhkan alat untuk menghadapi risiko tersebut dengan kebijakan dan biaya yang rasional. Dan hal tersebut merupakan proses dari manajemen risiko (Moeller, 2009).

Pelaksanaan manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen, bukan auditor internal ataupun komite audit. Sama halnya dengan pengendalian internal, manajemen risiko dilakukan oleh manajemen perusahaan sendiri dengan menentukan risiko apa yang sekiranya akan mereka hadapi, kemudian merencanakan cara penanggulangannya. Audit internal hanya bertugas untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan (Bapepam, 2008).

Bapepam telah mengeluarkan peraturan No. X.K.6 tahun 2012 yang mengharuskan perusahaan publik untuk membuat laporan tahunan yang memuat tentang kinerja perusahaan, salah satunya adalah pelaksanaan manajemen risiko. Di dalam peraturan tersebut, perusahaan perlu mengungkapkan gambaran umum

tentang manajemen risiko, identifikasi risiko serta cara perusahaan untuk menanggulangnya, dan efektivitas dari pelaksanaan manajemen risiko tersebut. Perusahaan diharuskan untuk melaksanakan manajemen risiko dengan menentukan bagaimana sistem manajemen risiko yang akan dilakukan, mengidentifikasi risiko dan menentukan cara penanggulangannya, kemudian menilai efektivitas dari manajemen risiko tersebut.

2.1.3 Pengungkapan Informasi Pengendalian Internal

2.1.3.1 Definisi Pengungkapan

Paramitha (2012) menyatakan bahwa pengungkapan merupakan suatu alat perusahaan untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada pemakai laporan. Pemakai laporan tentunya mempunyai kepentingan pada perusahaan, sehingga perusahaan mengadakan pengungkapan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Tujuan pengungkapan secara umum adalah untuk menyajikan informasi yang dianggap perlu demi tercapainya tujuan pelaporan keuangan, sehingga dapat melayani kebutuhan pengguna laporan keuangan yang berbeda-beda. Selain itu, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan tersebut (Paramitha, 2012).

2.1.3.2 Dasar Pengungkapan Pengendalian Internal

Berdasarkan peraturan No. X.K.6 tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi emiten atau Perusahaan Publik yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib

memberikan uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan perusahaan, setidaknya mengenai:

- 1) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- 2) *review* atas efektivitas sistem pengendalian internal.

Sebuah laporan tahunan adalah laporan komprehensif dari aktivitas perusahaan yang berlangsung dalam suatu periode. Laporan tahunan dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan dan kinerja keuangannya kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan (Downes dan Barrons, 1995) dalam Arifuzzaman (2011). Para investor harus mampu membaca laporan yang disampaikan dan memahami apakah perusahaan telah melakukan pengendalian yang sesuai untuk mengontrol kelangsungan usahanya dan kemudian melaporkan hasilnya (IIA, 2008). *Stakeholder* perusahaan, termasuk investor, harus mempunyai sarana untuk menilai apakah perusahaan telah mempunyai pengendalian yang sesuai dalam menjalankan operasinya. Sarana pengungkapan pengendalian ini adalah pada laporan tahunan perusahaan.

Arifuzzaman (2011) menyatakan bahwa investor dan *external stakeholder* (pihak berkepentingan diluar perusahaan) mempunyai kepentingan yang terbatas dalam pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan pengungkapan pengendalian internal, reliabilitas laporan keuangan akan meningkat, tujuan dari tata kelola perusahaan yang efektif juga akan tercapai. Pengungkapan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan pengendalian yang sesuai untuk

melaksanakan kegiatan operasional dan finansialnya. Sehingga akan memberikan kepercayaan pada investor dan *external stakeholder* atas laporan yang disajikan oleh perusahaan.

2.1.3.3 Informasi Pengendalian Internal yang Perlu Diungkapkan Perusahaan

Leng dan Li (2011) mengungkapkan delapan informasi pengendalian internal yang perlu diungkapkan adalah: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; aktivitas pengendalian; informasi dan komunikasi; pengawasan internal; kelemahan pengendalian internal; evaluasi pihak internal; dan evaluasi pihak eksternal. Kedelapan informasi tersebut melingkupi seluruh informasi yang diperlukan oleh *stakeholder* untuk mengetahui situasi pengendalian internal yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan Arifuzzaman (2011) menyatakan bahwa area-area yang perlu diungkapkan oleh manajemen perusahaan adalah: *the effectiveness and efficiency of the internal control; contents on IC in the management report; purpose and nature of IC; internal auditor's role; audit committee's role; external auditor's role.*

Di Indonesia, standar pengungkapan informasi pengendalian internal diatur oleh Bapepam dan LK dalam peraturan No. X.K.6 tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi emiten atau Perusahaan Publik yang memberikan tanggung jawab pada perusahaan untuk mengungkapkan beberapa hal berkaitan dengan pengendalian internal pada laporan tahunan di bagian Tata Kelola Perusahaan. Unit audit internal dan manajemen risiko juga perlu diungkapkan bersama dengan pengendalian internal karena keterkaitan

ketiga item tersebut di dalam pengendalian internal perusahaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemilihan item-item ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Thanh dan Cheung (2010) yang menentukan *Internal Control Disclosure Score (ICDS)* dengan item pengungkapan: Frekuensi Rapat Komite Audit; Fungsi Manajemen Risiko; dan Fungsi Audit Internal. Sehingga, mengacu pada peraturan No. X.K.6, informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan yang berkenaan dengan pengendalian internal diantaranya:

- 1) Komite Audit, mencakup antara lain:
 - (1) Nama;
 - (2) Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukan;
 - (3) Riwayat pendidikan;
 - (4) Periode jabatan anggota Komite Audit;
 - (5) Pengungkapan independensi Komite Audit;
 - (6) Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;
 - (7) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) Komite Audit.
- 2) Uraian mengenai unit audit internal meliputi:
 - (8) nama;
 - (9) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan;

- (10) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
 - (11) struktur dan kedudukan unit audit internal;
 - (12) tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) unit audit internal; dan
 - (13) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku;
- 3) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
- (1) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - (2) *review* atas efektivitas sistem pengendalian internal;
- 4) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, palingkurang mengenai:
- (1) gambaran umum mengenai sistem manajemen risikoperusahaan;
 - (2) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
 - (3) *review* atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan

2.1.4 Good Corporate Governance

Corporate governance bukanlah sesuatu yang baru bagi manajemen korporasi. Awal konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan IMF dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis (Sulistyanto dan Lidyah, 2002). Masalah *corporate governance* muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan sehingga rentan akan konflik kepentingan (Husnan, 2007). Pada tahun 1999 telah dibentuk pedoman

good corporate governance yang pertama, pada tahun 2006 pedoman tersebut direvisi.

2.1.4.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Good corporate governance menurut *world bank* adalah kumpulan hukum, peraturan, kaidah yang wajib dijalani dan dapat mendorong kinerja sumber daya perusahaan bekerja secara efisien dan menimbulkan hasil ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Pengertian lain mengenai *good corporate governance* adalah suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dan juga menyediakan struktur tujuan perusahaan, sarana mencapai tujuan perusahaan, dan pengawasan kinerja (OECD,2004)

Pengertian *good corporate governance* diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu pedoman bagi perusahaan. Pedomana tersebut menngandung peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah. Dimana tujuanya adalah untuk menciptakan efisiensi bisnis dan menyelaraskan hubungan manajemen, dewan komisaris, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Penyelarasan ini bertujuan intuk mengurangi konflik kepentingan antar pihak.

2.1.4.2 Asas-asas *Good Corporate Governance*

Asas-asas good corporate governance menurut (KNKG, 2006) adalah sebagai berikut:

1. *Transparancy*

Untuk menjaga objektivitas dalam bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal-hal yang penting dalam pengambilan keputusan pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya

2. *Accountability*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan baik sesuai dengan kepentingan perusahaan tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan pihak lain.

3. *Responsibility*

Perusahaan harus wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat tercipta dan terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency*

Untuk menciptakan *good corporate governance* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2.1.5 Identifikasi Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.1.5.1 Dewan Komisaris Independen

Pengertian dari Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal. Dalam suatu perseroan komisaris diharapkan menjadi penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas, jadi seperti mewakili pemegang saham minoritas. Ini dimaksudkan agar kepentingan pemegang saham minoritas tidak terabaikan. Keberadaan Komisaris Independen bergantung pada Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi suatu kewajiban.

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam praktek *good corporate governance*. Perusahaan yang menganut pedoman *gorporate governance* wajib membentuk suatu dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ dalam perusahaan yang membantu perusahaan dalam hal

pengawasan. Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Selain melakukan pengawasan dan member nasihat kepada direksi, dewan komisaris juga bertugas memastikan perusahaan berpedoman pada *good corporate governance*, namun dewan komisaris tidak diperbolehkan ikut campur dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan operasional perusahaan (Pedoman KNKG, 2006).

Prinsip dewan komisaris dalam (Pedoman KNKG, 2006) diantaranya adalah:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan tindakan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat dan dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus bertindak profesional yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
3. Fungsi pengawasan, dan pemberian nasihat kepada direksi meliputi tindakan pencegahan, perbaikan, sampai dengan tindakan pemberhentian sementara.

Tidak ada batasan mengenai aturan jumlah dewan komisaris, perusahaan dapat menentukan sendiri berapa jumlah dewan komisaris sesuai dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan factor efektifitas pengambilan keputusan. Setiap dewan komisaris wajib memiliki komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi perusahaan, komisaris ini disebut komisaris

independen. Dalam penentuan jumlah dewan komisaris independen harus diperhatikan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris tersebut. Pedoman KNKG (2006) menyatakan bahwa salah satu dari seorang komisaris independen tersebut harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen diatur dalam pasal 120 pasal (1) dan (2)

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Jumlah komisaris independen dalam perusahaan sekurang-kurangnya adalah satu orang. Komisaris independen tersebut diangkat melalui RUPS dari pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan atau dewan komisaris lainnya. Istilah independen disini bukan berarti bahwa komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan anggota direksi tidak independen. Independen disini adalah bahwa komisaris tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi. Maksud dari tidak memiliki hubungan terafiliasi adalah komisaris independen tidak memiliki

hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, direksi, dan dewan komisaris lainya serta dengan perusahaan itu sendiri.

Semakin besar persentase komisaris independen maka semakin meningkatkan kualitas peran pengawasan yang dilakukan dewan komisaris terhadap kinerja manajemen. Dengan demikian praktek manajemen laba dapat dikurangi dengan cara membentuk persentase yang cukup besar untuk dewan komisaris independen. (Rahmawati,2013). Sama seperti (Tiswiyanti,2012) untuk memberikan kualitas pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen agar tidak terjadi manajemen laba maka harus memperkuat proporsi dewan komisaris independen.

2.1.5.2 Kepemilikan Manajerial

Dewi (2008) dalam (Putra, 2013) menyatakan bahwa manajer mendapat kesempatan untuk terlibat dalam struktur kepemilikan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) meyakini bahwa struktur kepemilikan saham memiliki dampak terhadap kegiatan manajerial, dan kepemilikan manajerial berhasil menjadi suatu mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan dan *moral hazard* dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajerial (*insider*) atas sekuritas perusahaan dapat menyamakan kepentingan *insider* dengan pihak ekstern dan akan mengurangi peranan hutang sebagai mekanisme untuk meminimumkan *agency cost*. Semakin meningkatnya kepemilikan oleh *insider* akan menyebabkan *insider* semakin berhati-hati dalam

menggunakan hutang dan menghindari perilaku *opportunistic* karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari tindakannya, sehingga mereka cenderung menggunakan hutang yang rendah (Faisal, 2000 dalam Murni dan Andriana, 2007).

Wahidahwati (2002) dalam (Rustendi dan Jimmi, 2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial sendiri adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dari besarnya presentasi saham yang dimiliki oleh manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan manajemen dalam saham perusahaan, dimana mekanisme kepemilikan manajerial mampu mengurangi masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Dengan adanya keselarasan kepentingan tersebut diharapkan manajemen tidak bertindak oportunistik terhadap kepentingan sendiri, dan praktek manajemen laba dapat dihindari atau dikurangi.

2.1.5.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan terhadap saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan perusahaan institusi lain (Tarjo, 2008). Ituriaga dan Zans(1998) dalam (Widanar, 2009) menyatakan bahwa proporsi pemegang saham yang dimiliki institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Perusahaan tersebut dapat berpengaruh dalam pengawasan manajemen. Sheiler dan Vishny (1986) menyatakan bahwa adanya pemegang saham besar seperti

kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen dengan pengawasan yang lebih optimal.

Signifikansi kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi dari mereka yang cukup besar dalam perusahaan. Apabila institusi tersebut merasa tidak puas maka institusi dapat menjual sahamnya. Perubahan perilaku kepemilikan institusional dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusannya. Putriani (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba.

2.1.6 Kualitas Laba

Mohammady (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah output terpenting dalam sebuah sistem akuntansi. Berdasarkan kegunaannya tersebut, maka kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dampak yang besar bagi pihak-pihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, misalnya investor. Kualitas laba menjadi bagian terpenting dari laporan keuangan, karena kualitas laba dapat menggambarkan kualitas laporan keuangannya. Kualitas laba mempunyai banyak definisi di dalam ilmu akuntansi. Laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar (Kieso, 2011).

2.1.6.1 Definisi Kualitas Laba

Laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusi kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham

dalam bentuk bunga, saham, dan dividen (Kuntariati, 2013). Laba dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila laba dapat digunakan untuk membuat keputusan yang terbaik, dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan *return* saham (Mullah, 2009) dalam Purwati (2012). Laba yang semakin dekat dengan aliran kas operasi mengindikasikan laba yang semakin berkualitas (Kuntariati, 2013). Kualitas laba tidak berhubungan dengan tinggi atau rendahnya laba yang dilaporkan, melainkan meliputi *understatement* dan *overstatement* dari laba (bersih) (Lesmana dan Surjanto, 2003). Kualitas laba adalah tingkat dimana laba yang dilaporkan menggambarkan dasar kinerja operasi perusahaan (Muhammady, 2010).

2.1.6.2 Fungsi Kualitas Laba

Laba perusahaan merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan (Kuntariati, 2013). Informasi laba berperan penting bagi perusahaan dalam membuat berbagai keputusan penting (Purwati, 2012). Laba yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yaitu yang memiliki karakteristik relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas/konsistensi (Paulus, 2012). Apabila laba yang disajikan tidak sesuai dengan laba yang sebenarnya diperoleh perusahaan, laba yang disajikan akan menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Kualitas laba yang lebih baik akan menjadi jaminan bagi arus kas operasi perusahaan di masa datang (Leng dan Li, 2011). Kuntariati (2013) menyatakan laba yang berkualitas adalah yang menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen, sehingga tidak menyesatkan pihak pengguna laporan

keuangan. Dapat disimpulkan bahwa jika suatu laba berkualitas, akan menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen, maka laba tersebut akan dapat menggambarkan arus kas operasi perusahaan di masa datang.

2.1.6.3 Pengukuran Kualitas Laba

Selama ini tidak ada ukuran yang pasti atau tepat untuk mengukur seberapa besar kualitas laba dari suatu laporan keuangan, yang ada hanya merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai kualitas laba tersebut (Sutifah, 2010). Sehingga ukuran laba yang digunakan pada penelitian dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. (Mohammady, 2010) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kategori yang dapat membangun kualitas laba. Kategori tersebut diantaranya: (1) sifat *time-series* dari laba; (2) konsep kualitatif yang berdasarkan kerangka konseptual FASB; (3) hubungan antara kas, akrual, dan pendapatan; dan (4) keputusan implementasi. Berbeda dengan (Givoly, 2010) dalam Surifah (2010), yang mengukur kualitas laba menggunakan: (1) persistensi akrual; (2) estimasi kesalahan dalam proses akrual; (3) ketiadaan manajemen laba; dan (4) konservatisme.

Salah satu cara menentukan kualitas laba menurut (Givoly, 2010) adalah dengan ketiadaan manajemen laba. Manajemen laba telah umum digunakan sebagai proksi dari kualitas laba (Thanh dan Cheung, 2010). Manajemen laba merupakan pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk berbagai tujuan yang spesifik (Scott, 2006). Manajemen laba dapat dibagi menjadi *opportunistic earnings management* dan *efficient earnings management*. Tujuan dari *opportunistic earnings management* adalah memodifikasi laporan keuangan untuk

menyesatkan pemegang saham mengenai gambaran kinerja perusahaan, yang dapat mempengaruhi kontrak berbasis akuntansi yang dipengaruhi oleh nominal-nominal pada laporan keuangan (Lin, 2011). Kebijakan manajemen laba yang didasari oleh motivasi *opportunistic* cenderung melakukan manipulasi laba melalui berbagai macam dimensi (Sunarto, 2009). Sehingga terdapat persepsi publik bahwa manajemen laba hanya akan lebih menguntungkan pihak manajemen dibandingkan pemegang saham (Thanh dan Cheung, 2010). Manajemen laba dari perspektif *efficient earnings management* dilakukan manajemen untuk menyampaikan informasi *private* kepada investor, untuk meningkatkan konten informasional pada laba dan untuk mendorong komunikasi antara manajemen, pemegang saham, dan publik (Lin, 2011).

Manajemen laba dapat diukur dengan *Discretionary Accrual* pada *Modified Jones Model*, dengan mengestimasi akrual dari aset, pendapatan, dan aset tetap (Givoly, 2010; Thanh dan Cheung, 2010). *The Modified Jones Model* telah menjadi alat yang paling baik dan yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba (Thanh dan Cheung, 2010). Manajemen laba bertujuan untuk mengelabui *stakeholder*. Perusahaan dengan manajemen laba yang rendah, maka kualitas labanya lebih tinggi (Thanh dan Cheung, 2010). Hubungan antara manajemen laba dengan kualitas laba membuat *discretionary accrual* dapat digunakan sebagai alat ukur kualitas laba. Leng dan Li (2011) menyatakan "*accruals quality is widely used as a proxy variable of earnings quality. ... Many scholars believe that the level of discretionary accruals could measure the level of earnings quality*". Paulus (2012) menyatakan bahwa dengan

menggunakan ukuran perubahan akrual total, laba yang berkualitas adalah laba yang mempunyai perubahan akrual total kecil. Pengukuran ini mengasumsikan bahwa perubahan total akrual disebabkan oleh perubahan *discretionary accruals*. Estimasi *discretionary accruals* dapat diukur secara langsung untuk menentukan kualitas laba. Semakin kecil *discretionary accruals* maka akan semakin tinggi kualitas laba, dan begitu pula sebaliknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Yushita et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Auditor Eksternal, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba. Penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap kualitas laba. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 22 perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI pada periode tahun 2007-2011. Dengan menggunakan Analisis GLS, penelitian ini menemukan bahwa struktur dewan direksi, komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Discretionary Accrual* (DTAC) atau berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Kemudian kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Discretionary Accrual* (DTAC) atau berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

Khafid, M (2012) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (*CORPORATE GOVERNANCE*) Dan Struktur Kepemilikan

Terhadap Persistensi Laba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *board composition* (komposisi dewan komisaris), komite audit, *shareholder by manager/director* (kepemilikan manajerial), dan institusional investor terhadap kualitas laba. Desain penelitian ini merupakan penelitian *hypothesis testing study*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 430 perusahaan. Periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2005 – 2010 untuk menetapkan nilai dari variabel persistensi laba dan tahun 2010 untuk mengukur variabel komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*). Melalui kriteria yang ditetapkan, terpilih sampel sebanyak 242 perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yang bersumber dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) yang diperoleh dari *Accounting Corner* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, *homepage* BEI www.idx.co.id dan *annual report*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan adalah regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba.

Leng dan Li (2011) melakukan penelitian yang berjudul *Analysis of the Relationship between Listed Companies' Earnings Quality and Internal Control Information Disclosure*. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kualitas laba dengan pengungkapan informasi pengendalian internal dengan menggunakan sampel 1273 perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam *Shenzhen Stock Exchange* tahun 2010. Dengan menggunakan model regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas laba dengan pengungkapan informasi pengendalian internal. Semakin baik kualitas laba, maka pengungkapan pengendalian internalnya juga akan semakin baik.

Santoso dan Tan (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Pengungkapan Sosial, Dan Peringkat CGPI Terhadap Kualitas Laba”. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara mekanisme *Corporate Governance*, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional; informasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, dan tingkat indeks persepsi tata kelola perusahaan (CGPI) dari kualitas laba (diukur dengan penghasilan koefisien respon/ERC). Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1993 yang meliputi *the top ten and non-top ten of corporate governance perception index (CGPI) rate* pada tahun 2002-2008, kecuali tahun 2007 Jumlah sampel adalah 53 sampel dari 28 perusahaan. Dengan menggunakan analisa regresi, penelitian ini menemukan bahwa terdapat: (a) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas

laba; (b) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba; (c) tingkat pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kualitas laba; dan (d) indeks persepsi tata kelola perusahaan (CGPI) tingkat tidak berpengaruh terhadap kualitas laba ditingkat lima persen dari signifikansi, tetapi signifikan dalam tingkat sepuluh persen signifikansi.

Rupilu (2011) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Mekanisme *CORPORATE GOVERNANCE* Terhadap Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan menggunakan 4 variabel (dewan independen komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit), kualitas laba diukur dengan *discretionary accrual* dan nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan *Tobin's Q Value*. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 –2010. Sebanyak 90 perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai sampel. Dengan menggunakan model regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa variabel pengukuran tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaannya itu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Ini berarti bahwa mekanisme tata kelola perusahaan sebagai fungsi pengawasan terhadap manajemen sangat efektif dalam meningkatkan kualitas laba dan nilai perusahaan. Sedangkan, variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada kualitas labadan nilai perusahaan.

Thanh dan Cheung (2010) melakukan penelitian yang berjudul *Internal Control Reporting and Accounting Quality*. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara pengungkapan pengendalian internal dengan kualitas laba. Pengungkapan pengendalian internal diproksi menggunakan kualitas pelaporan, pernyataan efektivitas, skor pengungkapan, dan proporsi pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan data dari 152 perusahaan yang terdaftar di NASDAQ OMX. Kualitas laba diukur menggunakan *discretionary accrual*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara pengungkapan pengendalian internal dengan kualitas laba. Namun, penelitian ini memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk membahas area yang sama dengan arah yang berbeda.

Muid (2009) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kualitas laba. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara mekanisme *good corporate governance* dengan kualitas laba dengan menggunakan sampel 188 perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Jakarta tahun 2004 dan 2005. Penelitian ini menggunakan 4 komponen yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional. Dengan menggunakan model regresi berganda, penelitian ini menemukan kepemilikan manajerial secara positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laba, dewan komisaris tidak berpengaruh pada kualitas laba, dan kepemilikan institusional terdapat hubungan yang positif terhadap kualitas laba.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hipotesis Simultan

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan landasan teori diatas dapat diambil hipotesis sementara penelitian ini. Rahmawati (2013) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel mekanisme *good corporate governance* diantaranya dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme *good corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasar penelitian tersebut, hipotesis yang akan diuji secara simultan adalah sebagai berikut:

H₁: Pengungkapan Pengendalian Internal, Proporsi komisaris independen, Proporsi kepemilikan institusional, Proporsi kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.3.1.1 Pengaruh pengungkapan pengendalian internal terhadap kualitas laba

Penelitian yang dilakukan oleh Thanh dan Cheung (2010) pada 152 perusahaan yang terdaftar di NASDAQ OMX menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengungkapan informasi pengendalian internal dengan kualitas laba. Pengungkapan pengendalian internal menjadi informasi yang perlu dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa perusahaan telah menerapkan pengendalian internal yang efektif sehingga mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Di lain pihak, laba merupakan informasi akuntansi yang paling penting dari laporan

keuangan yang disajikan perusahaan. Informasi laba menjadi hal yang paling penting karena sering kali menjadi dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk mengungkapkan informasi pengendalian internal atau tidak. Dengan demikian, pengungkapan atas pengendalian internal yang dihasilkan perusahaan diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap kualitas laba perusahaan, sebagai salah satu cara untuk mengurangi *asymmetry information*. Dengan demikian, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₂: Pengungkapan informasi pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

2.3.1.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kualitas Laba

Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan. Peran pengawasan oleh dewan komisaris ini diharapkan akan meminimalisir konflik keagenan yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Penelitian oleh Boediono (2005) yang menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas laba dengan menggunakan analisis jalur menemukan bukti bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laba. Khafid, M (2012) melakukan penelitian untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *board composition* (komposisi dewan komisaris) terhadap kualitas laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laba. Yushita et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas

Auditor Eksternal, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba. Penelitian ini memberikan buktiempiris pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laba.

Dengan demikian, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₃ : Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

2.3.1.3 Pengaruh Proporsi Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Laba

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh manajemen yang secara aktif ikut mengambil keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling, 1976). Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial tinggi, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan menurun. Dengan semakin tingginya kepemilikan manajerial permasalahan keagenan diasumsikan akan semakin berkurang. Fidyati (2004) menemukan bukti bahwa *earning management* yang dilakukan mempunyai hubungan negatif dengan kepemilikan manajerial. Hal ini berarti semakin tinggi saham yang dimiliki oleh manajemen maka akan semakin tinggi kualitas laba. Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka *discretionary accrual* semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung bukti bahwa kepemilikan manajerial mengurangi dorongan perilaku oportunistik manajer. Yushita et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Auditor Eksternal, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba.

Penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba. Rupilu (2011) melakukan penelitian membahas tentang hubungan antara mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa variabel pengukuran tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan yaitu kepemilikan manajerial, Ini berarti bahwa mekanisme tata kelola perusahaan sebagai fungsi pengawasan terhadap manajemen sangat efektif dalam meningkatkan kualitas laba dan nilai perusahaan. Khafid, M (2012) melakukan penelitian untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *shareholder by manager/director* (kepemilikan manajerial), terhadap kualitas laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laba. Dengan demikian, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₄: Proporsi Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

2.3.1.4 Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan kepentingan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intensif (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional dapat

menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.

Boediono (2005) menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laba. Artinya semakin tinggi kepemilikan institusional, maka laba akan semakin berkualitas. Penelitian lain oleh Fidyati (2004) menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa kepemilikan saham oleh institusi dapat menjadi kendala bagi manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba akan meningkat. Yushita et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Auditor Eksternal, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba. Penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba. Rupilu (2011) melakukan penelitian membahas tentang hubungan antara mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa variabel pengukuran tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Ini berarti bahwa mekanisme tata kelola perusahaan (Kepemilikan institusional) sebagai fungsi pengawasan terhadap manajemen sangat efektif dalam meningkatkan kualitas laba dan nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₅: Proporsi Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

2.4 Kerangka Pikir

Teori Agensi telah memberikan penjelasan tentang hubungan antara agen (manajemen) dan pemilik (pemegang saham). Manajemen perusahaan sebagai agen mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan terjadinya *asymmetry information* dan kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba, yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang diinformasikan kepada pemegang saham. Sehingga pemegang saham perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa manajemen telah bertindak sesuai atau selaras dengan kepentingan pemegang saham. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan *review* terhadap pengendalian internal dan mekanisme *good corporate governance* yang terdapat di laporan tahunan perusahaan.

Manajemen perusahaan perlu memberikan laba yang berkualitas dan tidak menyesatkan pemegang saham. Dengan memberikan laba yang berkualitas, manajemen diharapkan dapat memberikan pengungkapan pengendalian internalnya dengan baik dan menerapkan mekanisme *good corporate governance* untuk memberikan keyakinan bagi pemegang saham bahwa manajemen telah bekerja, bertindak, dan membuat keputusan secara efektif dan selaras dengan kepentingan pemegang saham. Untuk itu, penelitian ini akan membahas tentang pengaruh pengungkapan pengendalian internal dan mekanisme *good corporate governance* terhadap kualitas laba. Selain itu, juga akan dibahas mengenai pengaruh variabel kontrol, yaitu ROE dan ROA. Kerangka pikir dalam bentuk gambar dapat dilihat pada Gambar 2.1.berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

